

Tinjauan Terhadap Transformasi FALINTIL ke F-FDTL dan Implikasinya

Pengantar

FALINTIL, *Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste* (Tentara Pembebasan Nasional Timor-Leste) didirikan oleh Partai FRETILIN. Meskipun pada mulanya FALINTIL adalah angkatan bersenjata partai FRETILIN, namun dalam sejarah perkembangannya mengalami berbagai momen termasuk melepaskan diri dari Partai FRETILIN.

Selama masa perjuangan, FALINTIL memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Timor Leste, sehingga berfungsi sebagai perekat bagi dua front yaitu Front Diplomatik dan Front Klandestin. Warisan ini senantiasa hidup dalam hati rakyat negeri ini yang mendambakan kemerdekaan, terlebih karena kedekatan rakyat dengan FALINTIL selama masa perjuangan pembebasan.

Setelah mencapai kemerdekaan, terdorong oleh desakan akan profesionalisme, maka FALINTIL ditransformasikan menjadi F-FDTL di bawah pembinaan PBB untuk mengemban misi mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini di masa damai.

Tetapi seiring dengan transformasi tersebut, muncul juga berbagai masalah seperti masalah perekrutan yang berimbas pada lahirnya berbagai kelompok bermotivasi politik seperti Veteranu, Antigu Kombattente dan lain-lain.

Artikel ini selain mengkaji tentang perjuangan FALINTIL bagi kemerdekaan Timor Leste dan keberadaan FALINTIL pada zaman kemerdekaan ini, juga dampak dari transformasi FALINTIL menjadi F-FDTL pada situasi saat ini. Dalam Artikel ini juga kami mencoba memberikan beberapa alternatif sebagai usulan dan kontribusi dari La'õ Hamutuk terhadap proses pembangunan negeri ini.

Sejarah singkat FALINTIL

FALINTIL dibentuk pada tanggal 20 Agustus 1975, sebagai respon dari FRETILIN terhadap pergolakan politik pada waktu itu. FALINTIL memulai misinya dengan pasukan yang jumlahnya sekitar 27.000 orang. Ketika Invasi Militer Indonesia atas wilayah Timor Leste, FALINTIL memilih untuk menyisir ke hutan.

(Bersambung ke halaman 2)



Daftar Isi . . .

Tinjauan Terhadap Transformasi FALINTIL Ke F-FDTL Dan Implikasinya	1
Laporan Intercambio Filipina	7
Surat tanggapan dari UNDP dan Komentar LH	12
Berita Singkat.....	13
Editorial	20



Antara tahun 1978-1982, FALINTIL menghadapi masa-masa yang sangat sulit, dimana pangkalan pendukungnya (Base de Apoio) digempur dan dihancurkan oleh militer Indonesia yang mendapat dukungan dari negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat. FALINTIL berjalan dalam suatu kevakuman kepemimpinan dan structural. Karena banyak pemimpin FALINTIL, termasuk Nicolau Lobato terbunuh ketika Indonesia melancarkan serangan terhadap Pangkalan pendukung (Base de Apoio) FALINTIL.

Pada tahun 1981 tepatnya bulan Maret, Xanana yang pada waktu itu kurang dikenal terpilih sebagai Komandan tertinggi FALINTIL melalui suatu konferensi rahasia yang disebut Konferensi Nasional Untuk Reorganisasi Perjuangan, yang diadakan di Lacluta, Viqueque. Dibawah kepemimpinan Xanana, terdapat berbagai perubahan dalam tubuh FALINTIL.

Sebagai langkah pertama adalah restrukturisasi dan reorganisasi FALINTIL. Selain itu, Xanana juga melakukan berbagai perubahan dalam tubuh FALINTIL.

Pertama, konsep awal bahwa FALINTIL sebagai *Limán Kroat FRETILIN* (*pasukan sayap FRETILIN*) berubah.

Xanana memunculkan ide Kesatuan Nasional. Dalam konsep ini, FALINTIL bukan hanya milik partai FRETILIN, tetapi milik semua rakyat Maubere yang menginginkan kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah untuk merangkul semua kelompok yang selama ini memiliki perbedaan pendapat dalam proses menuju kemerdekaan. Sebagai implementasinya Xanana menggunakan pendekatan persuasif dengan jalan negosiasi dengan berbagai partai dan organisasi-organisasi politik

yang ada diantaranya UDT, KOTA,

Trabalista dan lainnya.

Tujuan utama dari kebijakannya adalah FALINTIL harus menjadi simbol persatuan nasional dan terbuka bagi siapa saja yang memiliki tujuan untuk Kemerdekaan. Meskipun ide tersebut mendapat tantangan dari komandan-komandan FRETILIN, namun Xanana berusaha untuk merangkul seluruh masyarakat untuk bersatu dalam FALINTIL, bukan hanya orang-orang dari FRETILIN. Karena kebijakan ini, terjadi perpecahan dalam tubuh FALINTIL karena kelompok garis keras dalam tubuh FALINTIL tidak sepatutnya dengan model ini.

Kedua, pendekatan dengan Petinggi TNI. Sebagai strategi untuk gencatan senjata, Xanana juga melakukan negosiasi dengan petinggi-petinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seperti Gatot Purwanto, William da Costa dan Moerdani, meskipun kemudian kontak senjata kembali terjadi. (Strategi-strategi yang dimunculkan oleh Xanana di satu sisi dapat menyatukan semua kalangan. Tetapi di lain pihak, tidak disetujui oleh kelompok garis keras dalam tubuh FALINTIL).

**Dengarkan Program Radio "Iguualidade" La'o Hamutuk
Wawancara dan Komentar mengenai isu-isu yang kami
investigasi dan isu-isu lainnya!**

**Dalam Bahasa Tetum dan Indonesia
Setiap Hari Minggu, pukul 1:00 siang di Radio Timor Leste**

Kantongisasi Aileu

Situasi di atas mengantar pihak UNTAET dan PKF untuk mencari jalan keluarnya. Maka terjadilah suatu persetujuan lisan bersama antara Jenderal Peter Cosgrove dengan Taur Matan Ruak pada bulan November 1999. Secara umum, persetujuan ini tidak memperkenankan anggota FALINTIL untuk membawa senjata keluar dari area Kantongisasi dan juga anggota FALINTIL diharapkan tetap tinggal di Posko/*cantonment*.

Selama Kantongisasi di Aileu, terjadi berbagai persoalan. Hal ini diakui oleh beberapa sumber yang kami temui. Diakui bahwa ada krisis kemanusiaan, dimana kurang makanan dan obat-obatan. Memang ada bantuan, tetapi ini juga tidak bisa mencukupi kebutuhan, sehingga terjangkit penyakit seperti TBC, Malaria, dan lain-lain. Dampak dari masalah ini adalah muncul ketidakdisiplinan dari anggota FALINTIL selama di Aileu sebagai wujud dari ketidakpuasan terhadap kondisi pada waktu itu. Kombinasi dari semua persoalan ini menyebabkan hubungan tidak baik antara FALINTIL dengan UNTAET/PKF.

Persetujuan lisan antara kedua pihak tidak menjawab masalah masa depan FALINTIL. Maka CNRT, IN-TERFET, UNTAET dan FALINTIL mengadakan berbagai pertemuan selama bulan Maret 2000 untuk membahas mengenai masa depan FALINTIL.



Ada beberapa hal yang dibicarakan pada waktu itu. Diantaranya Kemungkinan untuk mengintegrasikan FALINTIL ke dalam masyarakat sipil, kerjasama antara FALINTIL dan PKF dalam operasi, mempertimbangkan mengenai kemungkinan untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata Timor Leste dan apa saja yang menjadi ancaman eksternal buat Timor Leste ke depan setelah INTERFET mengakhiri misinya.

Dari sisi ancaman eksternal, ada suatu kekhawatiran akan adanya ancaman dari pihak Milisi yang pada waktu itu masih berada di Timor Barat. Dari sinilah muncul ide untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata yang dapat mengambil alih peran pasukan perdamaian untuk ke depan.

Pertemuan inilah yang mengilhami dan menjadi landasan untuk semua proses ke depan. Sebagai tindak lanjutnya maka pada bulan Mei 2000, sebuah Tim dari King-College mengadakan sebuah studi tentang berbagai opsi-opsi untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata bagi negara baru ini. Hasil dari studi ini diserahkan kepada UNTAET pada tanggal 8 Agustus 2000, dengan tiga opsi yang direkomendasikan :

Opsi I: Opsi ini dianggap paling dekat dengan “Visi” FALINTIL: Dimana berkekuatan 3000-5000 dengan inti dari bekas tentara FALINTIL, sisanya dari wajib militer. Dibentuk suatu badan kecil dengan pasukan khususnya untuk urusan kendali terhadap kerusuhan di masyarakat. Angkatan laut dan udara sederhana.

Opsi II: Berkekuatan 3000 pasukan, kurang lebih separuhnya bekas tentara FALINTIL, sisanya berasal dari wajib militer. Tidak diperlukan pasukan khusus untuk menanggulangi kerusuhan karena semua prajurit akan dilatih untuk masalah ini, sedangkan angkatan laut dan udara merupakan aspirasi.

Opsi III: Sama, berkekuatan 3000 pasukan dengan kurang lebih separuhnya bekas tentara FALINTIL. Tidak diperlukan pasukan khusus untuk menanggulangi angkatan laut dan udara merupakan aspirasi.

Perbedaannya adalah pada sisa pasukan di luar FALINTIL. Tentara ini bentuknya pasukan cadangan sukarela yang berada di rumah dan bergabung hanya pada saat-saat pemberian pelatihan.

Pada saat terjadi perang, mereka akan ikut bertempur bersama-sama dengan tentara reguler atau sebagai pasukan gerilya.

Dari ketiga opsi itu yang menjadi kesimpulan bahwa Timor Leste membutuhkan sebuah angkatan bersenjata, dan FALINTIL menjadi embrio terhadap angkatan bersenjata itu. Namun Opsi ketiga yang menjadi pilihan utama untuk model angkatan bersenjata di Timor Leste. Kemudian pada tanggal 20 sampai 21 November 2000, diadakan sebuah konferensi Donor untuk mendiskusikan mengenai pembentukan sebuah angkatan bersenjata di Timor Leste. Dua negara yang bersedia pada waktu itu untuk memberikan bantuan adalah Australia dan Portugal.

Untuk mensyahkan pembentukan FDTL, maka UNTAET mengeluarkan Regulasi UNTAET No.1 tahun 2001 (UNTAET/REG/2001/1). Regulasi ini selanjutnya dikonsultasikan dengan *National Council (NC)* yang pada waktu itu difungsikan sebagai mini parlement diminta untuk mensyahkan itu pada tanggal 29 Januari 2001. Dua hari kemudian, FALINTIL secara resmi ditransformasikan menjadi FDTL. Sebagai tahap pertama, 600 orang direkrut. Sementara yang lain diintegrasikan ke dalam komunitas. Dan pada tanggal 1 Februari 2001, FALINTIL secara resmi ditransformasikan ke FDTL.

Proses perekrutan itu sendiri diadakan secara internal. Pada proses perekrutan tersebut, muncul permasalahan. Ada beberapa orang yang tidak setuju bahkan tidak senang dengan proses perekrutan tersebut, misalkan CPD-RDTL, Sagra da familia, Colimao dan Osnaco. Karena mereka menilai bahwa proses perekrutan tersebut tidak demokrasi.

Karena pada perekrutan batalyon pertama hanya 600 orang eks FALINTIL yang direkrut, maka dijanjikan bahwa pada perekrutan batalyon selanjutnya akan mengambil dari eks FALINTIL. Persyaratan pada proses perekrutan tersebut adalah maksimal berusia dibawah 21 tahun, sementara mayoritas eks FALINTIL berumur diatas 21 tahun, sehingga hanya sedikit saja anggota FALINTIL yang direkrut, kebanyakan yang diterima adalah pemuda-pemudi dari kalangan masyarakat.

Pihak-Pihak yang Berperan

Ada beberapa institusi yang sangat berperan pada waktu itu. **Pertama adalah UNTAET.** UNTAET adalah institusi sentral pada waktu itu. Peran Eksekutif dan Legislatif semuanya dimainkan oleh UNTAET. Di bawah UNTAET ada *East Timor Transition Administration (ETTA)*. Institusi ini adalah badan eksekutif sementara yang juga dibentuk oleh UNTAET. Tetapi kekuasaannya masih kurang berpengaruh dalam semua proses pengambilan keputusan. Dilihat pada mandat yang diberikan kepada UNTAET, tidak ada definisi yang jelas mengenai mandatnya dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah angkatan bersenjata di Timor Leste. Padahal diakui bahwa UN belum pernah terlibat dalam proses pembentukan sebuah angkatan bersenjata di negara lain sebelumnya.

National Council (NC) yang dibentuk pada waktu itu

sebenarnya kurang memiliki legitimasi karena lembaga ini juga dibentuk melalui suatu proses yang kurang demokratis. Sebelumnya ada National Consultative Council (NCC). Fungsinya juga hanya sebatas konsultasi. Sementara NC yang dibentuk sebagai suatu respons terhadap semua proses yang tidak demokratis itu juga tetap dinilai tidak menjawab tuntutan karena prosesnya yang tidak demokratis itu. NC juga dibentuk melalui suatu regulasi UNTAET, sehingga tetap saja dianggap tidak representatif. Kemudian Draft Regulasi itu juga diberikan dalam waktu yang singkat, sehingga NC tidak memiliki waktu yang banyak untuk mempelajarinya.

Aktor yang kedua adalah Negara-negara Donor. Mereka memainkan peran penting dalam proses ini. Dalam konferensi donor mengenai pembentukan sebuah angkatan bersenjata untuk Timor Leste, dihadiri oleh duabelas negara donor. Namun dari dokumen-dokumen yang ada, Australia dan Portugal merupakan negara yang bersedia untuk memberikan pelatihan, menyuplai senjata dan lainnya. Sementara Thailand juga bersedia membantu untuk pertahanan area-area rural. Selain itu, negara raksasa seperti Amerika Serikat, Inggris juga ikut mendukung proses ini.

Aktor yang ketiga adalah King College dari London. Team ini diminta oleh UNTAET dan didanai oleh "*Departemen untuk Masalah Perselisihan dan Keamanan Inggris,*" untuk mengadakan suatu studi terhadap kemungkinan untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata untuk Timor Leste.

Tiga persoalan yang menjadi perhatian utama dari Tim ini adalah Masa Depan FALINTIL, Menguji kelayakan dan mengusulkan opsi atas angkatan bersenjata Timor Leste di masa mendatang dan menganalisa aspek pemerintahan dikaitkan dengan keamanan dan hubungan sipil militer. Team ini terdiri dari beberapa pakar militer dari Jerman, Mocambique dan US. Mereka tiba di Dili pada tanggal 7 July 2001. Hasil studi mereka inilah yang dijadikan pedoman untuk angkatan bersenjata Timor Leste.

Beberapa Persoalan

Beberapa persoalan yang kami identifikasi sebagai dampak dan akibat dari semua persoalan ini. **Persoalan pertama adalah tidak jelasnya mandat INTERFET tentang Perlucutan senjata.** Dibentuknya INTERFET sebenarnya berangkat dari suatu situasi keamanan di Timor Leste, dimana terjadi kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM di Timor Leste. Salah satu mandat INTERFET adalah melucuti pihak sipil yang bersenjata. Mandat ini tidak mempertimbangkan situasi sosial dan politik di Timor Leste, sebab di Timor Leste, ada FALINTIL yang eksistencinya diakui dan diterima oleh masyarakat. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah FALINTIL masuk dalam kategori Pihak Sipil yang bersenjata? Di sinilah letak persoalan yang menimbulkan kontroversi antara pemimpin lokal dan pemimpin INTERFET. Dari sinilah, kelihatan bahwa eksistensi



FALINTIL dan fungsinya mulai tidak jelas.

Persoalan yang kedua adalah ketidakjelasan mengenai mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan kepada UNTAET. Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, masalah pertahanan dan keamanan, hanya dijelaskan mengenai mandat untuk menciptakan keamanan di seluruh wilayah demi memperlancar segala proses pembangunan. Tetapi tidak ada definisi yang jelas mengenai apakah mandat UNTAET juga termasuk dalam mempersiapkan sebuah angkatan bersenjata di Timor Leste atau tidak. Jadi masa depan FALINTIL tidak jelas dalam mandat yang diberikan kepada UNTAET.

Persoalan yang ketiga adalah kurangnya Transparansi dalam semua proses itu. Pada waktu itu, UNTAET memainkan peran eksekutif dan Legislatif. Jadi segala prosesnya ditentukan oleh UNTAET. National Council (NC) yang dibentuk juga kurang memiliki legitimasi karena dibentuk melalui suatu proses yang tidak demokratis. Dan regulasi UNTAET yang melegalsir proses transformasi itu hanya dikonsultasikan dengan NC, dan bukan untuk memutuskan. Tidak ada konsultasi dengan publik mengenai hal ini, sehingga semua proses ini berjalan dengan tertutup. Opini Publik pada waktu itu memang tidak ada karena semua proses yang berjalan tidak transparan dan tertutup tersebut.

Persoalan keempat adalah masalah veteran. Memang harus diakui bahwa masalah ini sering dihadapi oleh negara-negara post-colonial. Tetapi melihat kepada kasus Timor Leste, salah satu faktor penyebabnya adalah proses transformasi FALINTIL yang kurang akomodatif terhadap opini publik dan kurangnya pertimbangan terhadap realitas sosial politik Timor Leste. Dimana sebuah pasukan pembebasan seperti FALINTIL, ketika ditransformasikan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti sejarah, politik, ekonomi, dan juga analisa akan dampak yang akan timbul dari transformasi itu. Tetapi karena adanya berbagai

kepentingan dalam semua proses itu, dan orientasi utamanya adalah sebuah pasukan yang professional, maka beberapa mantan FALINTIL yang telah memberikan kontribusinya dianggap tidak layak lagi dalam memenuhi kriteria yang ditentukan.

Persoalan kelima adalah adanya suatu usaha untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata yang professional dalam perspektif barat. FALINTIL yang dulunya adalah sebuah pasukan yang bersimbiosis dengan rakyat, kini dengan transformasi itu, identitas ini mulai pudar.

Persoalan keenam adalah hilangnya identitas FALINTIL. FALINTIL dulu adalah suatu pasukan pembebasan. Pembebasan lahir sebagai refleksi dari realitas sosial dan politik pada waktu itu dimana pasukan ini memiliki misi untuk membebaskan rakyat ini dari suatu belenggu penjajahan. Pembebasan dalam arti ini tidak sebatas pada masalah territorial, tetapi lebih dari itu adalah pembebasan secara sosial dari kemiskinan dan kemelaratan. Tetapi dengan transformasi itu, maka secara otomatis dan substansial, identitas ini mulai pudar dan hilang. Kelihatan bahwa FDTL sekarang bukan lagi sebuah pasukan pertahanan yang populis, tetapi lebih berorientasi elitis.

FALINTIL Pada Masa Sekarang

Pada masa sekarang, F-FDTL menjadi pasukan pertahanan Timor Leste. Eksistensinya telah dilindungi dalam Konstitusi RDTL. Konstitusi RDTL, Bab V pasal 146 dan 147 menjelaskan mengenai fungsi dari Pasukan pertahanan ini. Ayat dua dari Pasal 146 menggarisbawahi fungsi dari F-FDTL, dimana F-FDTL menjamin kemerdekaan nasional, integritas territory dan kebebasan serta keselamatan penduduk dan melawan segala agresi yang mengancam integritas teritori dan menghormati konstitusi. (*FALINTIL-FDTL guarantee the national independence, the territorial integrity and the freedom and safety of the populations against any aggression or he/she threatens*

expresses, in the respect for the constitutional order.)

Interpretasi sederhana terhadap ayat ini adalah bahwa fungsi dari F-FDTL untuk mempertahankan kedaulatan negara dan kemerdekaan RDTL. Jika melihat pada konteks sekarang, pertanyaannya adalah sejauh mana ancaman eksternal terhadap Timor Leste? Jika melihat pada konteks geografis, maka ancaman eksternal yang utama adalah datang dari Timor Barat, yaitu kekhawatiran akan infiltrasi dari Milisi. Selain itu dari Australia.

Melihat pada situasi global sekarang, seperti yang diutarakan oleh Professor Alan Dupont dalam sebuah Seminar tentang *Opsi Keamanan Bagi Timor Leste Pada Tahun 2002*, menggarisbawahi beberapa tipe ancaman eksternal dalam era global. Dalam Papernya, Ia melihat bahwa ancaman invasi militer kelihatannya tidak lagi menjadi ancaman utama. Namun isu-isu seperti Terrorisme Global, People Trafficking, Money Laundering, adalah ancaman utama bagi Timor Leste sekarang. Untuk mengantisipasinya, pendekatan diplomasi yaitu dengan membina hubungan yang baik antara RI dan Australia dianjurkan untuk ditempuh.

Dengan melihat situasi sekarang dan kebijakan pemerintah Timor Leste, kelihatan bahwa diplomasi akan dikedepankan untuk mengantisipasi masalah ini. Sehingga, hubungan dengan Pemerintah RI sangat penting, dan dalam kenyataannya melihat pada statement dan sikap politik dari para aktor politik di Timor Leste, berbagai langkah diplomatis tengah ditempuh untuk mengatasi masalah ini. Kemudian melihat pada kenyataan sekarang juga, bahwa F-FDTL tidak ditempatkan di perbatasan, dan hanya Polisi yang ditempatkan di sekitar itu.

Ancaman terhadap persoalan keamanan di Timor Leste juga seperti yang diutarakan oleh seorang pengamat Militer, Douglas Kamen dalam suatu wawancara dengan La'o Hamutuk bahwa, bahwa ancaman utama akan datang dari dalam negeri. Ketidakadilan sosial, sistem distribusi pendapatan yang tidak seimbang akan seringkali memicu konflik internal. Jika situasinya demikian, maka sudah otomatis adalah peran dari Polisi.

Melihat kembali kepada pengalaman Timor Leste selama tiga tahun menjadi sebuah negara berdaulat, FDTL baru difungsikan sekali, yaitu dalam kasus Atsabe, Ermera. Namun keterlibatan F-FDTL pada waktu itu juga memicu polemik karena tindakan F-FDTL pada waktu itu dinilai melanggar HAM. Dengan berbagai persoalan di atas dan realitas yang telah diutarakan, maka hingga sekarang meskipun secara konstitusional F-FDTL bertanggung jawab atas ancaman eksternal, namun kebijakan dan orientasi pemerintah RDTL lebih mengedepankan peranan dari Polisi, sementara F-FDTL belum memiliki suatu fungsi yang jelas.

Kesimpulan

Dengan berbagai paparan di atas, ada beberapa hal yang menurut La'o Hamutuk penting untuk dilakukan sebagai alternatif. **Pertama**, proses transformasi yang berjalan tidak

transparan dan tertutup harus dijelaskan kepada publik agar publik dapat memahami semua proses ini. Karena ketika transformasi dilaksanakan, semuanya berjalan dalam proses yang tidak jelas dan kurang transparan, dan menimbulkan pro dan kontra bagi publik. Kami menerima bahwa setiap perubahan dalam kebijakan adalah hal yang wajar sebagai bagian dari suatu proses. Tetapi proses perubahan itu harus berifat demokratis, transparan dan akomodatif agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan polemik di hari berikutnya. Dan untuk menjelaskan ini, keterlibatan komunitas internasional terutama PBB, penting karena proses transformasi dilakukan ketika UNTAET masih berkuasa penuh di Timor Leste.

Kedua, persoalan Veteran harus diselesaikan secara akomodatif dan inklusif. Meskipun masalah ini sudah menjadi lumrah di negara-negara pasca konflik, tetapi dalam kasus Timor Leste memiliki keunikan khusus. Sebab proses transformasi yang kurang transparan dan akomodatif menjadi salah satu factor ketidakpuasan pihak-pihak tertentu. Jika situasi ini tidak diperhatikan maka ibarat bom waktu yang bisa meledak suatu saat, dan dapat ditungkangi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik untuk memperjuangkan kepentingannya.

Ketiga, masih berkaitan dengan situasi di atas, jasa-jasa para mantan Pejuang harus dihargai dan harus mendapat pengakuan dari Pemerintah. Seperti yang telah diutarakan oleh beberapa mantan FALINTIL yang kami wawancarai, mereka tidak membutuhkan suatu posisi dalam pemerintah. Yang penting bagi mereka adalah pengakuan dari pemerintah, perhatian akan nasib dan kehidupan mereka. Kami menyadari bahwa ini membutuhkan suatu proses yang panjang, dan pemerintah melalui sekretaris negara urusan solidaritas dan buruh dan kementerian-kementerian terkait sedang melakukan berbagai proses untuk menuju ke sana. Tetapi persoalan ini tidak hanya melibatkan pemerintah RDTL, tetapi juga PBB.

Keempat, kami juga berpendapat bahwa semua program yang dirancang untuk membantu para eks pejuang harus benar-benar ditujukan kepada Mereka. Jangan hanya menjadikan nama Eks FALINTIL dan Eks Combatentes sebagai gorden semata, tetapi jika programnya ditujukan kepada mereka, maka partisipasi mereka dalam semua proses termasuk proses pengambilan keputusan penting agar mereka juga dapat menentukan masa depan mereka dan nasib mereka. Usulan ini didasarkan pada suatu pengalaman bahwa ketidakpuasan dari beberapa mantan pejuang dikarenakan opini dan ide mereka kurang diperhatikan dalam semua proses yang telah dilalui.

Kelima, peraturan mengenai fungsi dan tugas F-FDTL harus ditentukan sekarang, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara F-FDTL dan PNTL. Konstitusi saja belum cukup, diperlukan suatu Undang-Undang turunan untuk mengatur mengenai peran ini. ❖

“Agrarian Reform”: Sebuah Intercambio/Pertukaran dengan Kelompok-Kelompok Aktivistis di Filipina



Kondisi Agraria di Timor Leste

Timor Leste telah melalui tiga periode penjajahan, Portugal misalnya menjajah selama kurang lebih 450 tahun yaitu, kurang lebih pada tahun 1525 sampai dengan tahun 1974, kemudian Jepang selama 3,5 tahun dan Indonesia selama 24 tahun, yaitu pada tahun 1975 - 1999. Tiga periode penjajahan ini mewariskan permasalahan-permasalahan krusial terhadap para petani. Lebih-lebih pada jaman penjajahan Portugis dan Indonesia, menunjukkan bukti kuat bagaimana para pengusaha,

Selama bulan November-Desember 2004 La’o Hamutuk bersama 15 organisasi masyarakat sipil di Timor Leste bekerjasama dengan Initiatives for International Dialog (IID) dan Partnership Agrarian Reform and Rural Development Service (PARRDS) yang berbasis di Filipina telah mengorganisir sebuah Intercambio dengan fokus “Agrarian Reform”.

Pada tanggal 15 November 2004, La’o Hamutuk telah mengi-rikan delapan (8) orang aktivis Timor Leste yang selama ini memberikan perhatian pada hak asasi manusia, lingkungan hidup dan pertanian, kesetaraan gender dan analisa pembangunan untuk mengikuti intercambio di Filipina dalam mempelajari dan membagi pengalaman antara orang Timor Leste dengan para aktivis dan petani Filipina menyangkut pro-gram agrarian reform selama empat minggu. Ke-delapan orang ini adalah (1) Joaozito Viana dari Institusi *La’o Hamutuk*, (2) Mateus Tilman dari *Kdadalak Sulimutuk Institute* (KSI), (3) Joao Alves Trindade dari *Erpoleks Lequisi-Distrik Ermera*, (4) Amaro Silverio dos Santos dari *Klibur Joventude Haburas Rai (KJHR) Sacoco-Distrik Ermera*, (5) Rosito da Silva Belo dari *HAK Association-Distrik Baucau*, (6) Natalia de Jesus Cesaltino dari *Forum Komunikasi Perempuan Timor Lorosa’e (Fokupers)*, (7) Ernesto Gusmão dari *Institut Teknologi, Pertanian dan Ekonomi Kalo-heda (ITAEK) Uatolari-Distrik Viqueque*, dan (8) Juvençio Magno dari *Koperasi Pertanian Iliomar-Distrik Lospalos*.

pemimpin-pemimpin lokal tradisional (liurai-raja) dan gereja dengan dukungan pemerintah kolonial telah mengambil alih tanah-tanah produktif di berbagai tempat. Tanah-tanah yang dikuasai dianulir dalam bentuk sertifikat-sertifikat, realitas ini dapat dilihat dari luasnya penguasaan tanah oleh segelintir orang atau kelompok dengan batas-batas yang jelas.

Hal lain yang perlu dikaji kembali adalah konsekuensi buruk yang telah ditimbulkan oleh kapitalisasi tanah produktif pada era kolonial, dengan jelas telah membawa petani di sekitar perkebunan kopi, salah satu contohnya adalah petani di Ermera (Sacoco dan Liquisi) menjadi buruh-buruh tani absolut. Lain masalah buruh-tani perkebunan, lain pula petani disekitar area property yang kehilangan mata pencahariaannya sama sekali sebab mereka dulunya adalah pemilik-pemilik tanah kecil yang telah menjual tanahnya kepada industri property, kondisi ini dapat dilihat di daerah Comoro-Dili yang dulunya adalah daerah persawahan. Pengembangan industri property sangat kontras di berbagai Distrik, seperti di Distrik Suai dan Lospalos.

Persoalan lain setelah merdeka, pemerintah Timor Leste telah mengeluarkan perundang-undangan nomor 1 tahun 2003 mengenai benda tidak bergerak (Bens Imóves).

Tentu undang-undang ini lebih diarahkan pada peninggalan kolonialis (colonials asset) dialih-pemilikan kepada pemerintah. Walaupun keadilan agraria merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan ekonomi petani dan secara jelas termaktub dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor

Leste Pasal 54 ayat 4 “hak setiap warga negara Timor Leste untuk memiliki tanah”, namun persoalan tanah di Timor Leste menjadi fenomena konflik yang berkepanjangan di berbagai tempat.

Ketimpangan struktur agraria ini mengakibatkan banyak petani tidak memiliki tanah pertanian, karena tanah-tanah produktif telah dikembangkan menjadi daerah perkebunan kopi demi menyokong permintaan pasar Eropa (seperti di Ermera, same, Aileu dan Ainaro), perluasan kota ke arah-propertisasi (daerah Bairopite, Comoro dan di beberapa Distrik) serta demi kepentingan perluasan misi gereja (Lospalos, Viqueque, Baucau dan Dili).

Faktor penguasaan tanah oleh segelintir orang ini telah menimbulkan beberapa gerakan buruh, salah satu contohnya adalah para buruh perkebunan di Ermera pada tahun 1980-an sudah mulai melakukan pengerusakan pagar, tanaman kopi dan menyerang penjaga perkebunan. Dan pada tahun 2000 mereka mulai mendiami perkebunan kopi dan membagi-bagikannya di antara mereka.

Sejarah Singkat Agrarian Reform di Filipina

Secara historis, Timor Leste dan Filipina pernah dijajah bertahun-tahun oleh beberapa penjajah. Misalnya, Negara Republik Filipina dijajah oleh Spanyol dan Amerika, sementara Negara Republik Demokratik Timor Leste pernah dijajah oleh Portugal kemudian Jepang dan Indonesia. Pola hubungannya ke-dua negara dengan penjajah pun sama, yaitu pemiskinan petani melalui bangunan kapitalisasi tanah.

Filipina pada dekade tahun 1970-an adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun di bawah pimpinan Ferdinand Marcos. kemudian jatuh dalam era kediktatoran dan kehancuran ekonomi. Banyak petani dan aktivis tani yang mati sebagai martir agrarian reform pada pemerintahan diktator Ferdinand Marcos. Hal ini lebih diperparah melalui Martial Law-nya “undang-undang darurat militer” yang dikeluarkan oleh Marcos pada tahun 1972, Undang-undang darurat militer ini mengatasi hukum sipil dan bertujuan meredam perlawanan pada ide, niat dan perintah Marcos. Undang-undang ini juga mengebiri hak-hak politik rakyat ditandai dengan kehancuran secara sistematis institusi demokratik. Salah satu dampak dari undang-undang ini adalah para politikus dan negarawan secara bebas melakukan penghisapan terhadap petani, tanah-tanah produktif diambil alih secara paksa, terjadi pemupukan modal di tangan pengusaha, penguasa dan tuan-tuan tanah. Petani menjadi kontras dengan kemiskinan, mereka menjadi robot-robot kapitalis (buruh-tani). Realitas ini dapat dilihat dari analisis *Pe. Anoran* (seorang Pastor dan Direktur Executive NCPERD di propinsi Negros

Osidental) bahwa, agrarian reform dalam implementasinya telah berjalan selama 16 tahun namun kepemilikan tanah masih terkonsentrasi di tangan segelintir orang Filipina, sebanyak 80% rakyat Filipina tidak memiliki tanah pertanian,

terutama tanah untuk berproduksi. Hal ini mengakibatkan rakyat bertambah miskin.

Kenyataan ini akan mengantar kita pada fenomena pemiskinan petani sebelum 16 tahun lalu, artinya sebelum lahirnya program agrarian reform secara menyeluruh (CARP) pada tahun 1988. Pada tahun 1986 para tani, buruh, gereja, akademisi, pelajar dan para pemimpin-pemimpin yang berseemberangan dengan Marcos melakukan revolusi *people’s power* dan menuainya melalui *Congress for People’s Agrarian Reform* (kongres petani untuk agrarian reform). Marcos ditumbangkan dari kursi kepresidenan Filipina dan digantikan oleh Corazon Aquino. Kemudian pada tahun 1988 di bawah pemerintahan Presiden Corazon Aquino mengeluarkan program undang-undang agrarian reform menyeluruh (*comprehensive agrarian reform program/CARP*) yang dalam implementasinya di atur dengan *Republic Act 6657*, undang-undang ini diharapkan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Filipina.

Implementasi program ini dalam rencananya akan diselesaikan dalam 10 tahun kemudian, yaitu mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 1998. Kenyataannya, pro-gram ini tidak berhasil sesuai target yang diharapkan oleh CARP sehingga diperpanjang kembali selama 10 tahun ke depan, tahun 1998 sampai dengan tahun 2008.

Di Filipina agrarian reform lebih diarahkan kepada re-sertifikasi tanah dari tuan-tuan tanah kepada petani, dengan skema kebijakan CARP antara lain; peme-rintah melalui Departemen Agrarian Reform (1). meng-ambil atau meminta tanah dari tuan tanah secara lan-gsung kemudian dialihkan kepada petani (*compulsory acquisition*), (2) tuan tanah secara sukarela menyerahkan tananya kepada pemerintah atau secara damai kepada petani (*voluntary land transfer*), (3) tuan tanah menjual tanahnya kepada pemerintah atau kepada petani (*land transfer for sale*), atau (4) tuan tanah dan petani bersepakat untuk membagi hasil pendapatan (*sharing production profit*) dengan sistem bagi hasil yang diatur di dalam CARP. Berdasarkan beberapa alternatif ini, pemerintah akan memindah tangankan kepemilikan tanah kepada petani sesuai dengan kebijakan-kebijakan dimana pemerintah dan tuan tanah telah sepakati.

Sistem transfer tanah ini diawasi dan dikontrol langsung oleh pemerintah (Presiden) melalui sebuah lembaga pemerintah pusat (*Department of Agrarian Reform/DAR*) dan *Department Agrarian Reform Beneficiaries (DARB)* di tingkat daerah, dimana lembaga ini memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengstimulasi CARP agar berjalan sesuai dengan program nasional Filipina. Kegiatan Selama di Filipina *Intercambio* ini telah dilakukan di 3 pulau di bawah wilayah administratif Filipina, yaitu: Pulau Luzon (Propinsi *Tarlac, Pampanga, Zambales, Visayas* (propinsi *Negros Osidental*) dan *Mindanao* (propinsi *Cotabato dan Bukidnon*).

Peserta didampingi langsung oleh *Field Officer IID* di Timor

Leste (*Miss Ruby Lora*) dan Program Officer PARRDS (Partnership Agrarian Reform and Rural Development Service) Filipina (*Mr. Alejandro P. Soto*) yang merupakan Koordinator program intercambio di Filipina. Ke-dua pendamping ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup menyangkut agrarian reform di Filipina sehingga aliran-diskusi dan interaksi para pendamping ini sangat membantu para peserta untuk memahami isu ini dari berbagai aspek.

Kedua orang inilah yang juga mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan dengan para organisasi-organisasi sipil masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) di Pulau Luzon, Visayas dan Mindanao. Kelompok-kelompok LSM Nasional yang ditemui oleh peserta, antara lain: UNURKA, Philippine Ecumenical Action for Community (PEACE) Foundation, Project Development Institute (PDI), Partnership Agrarian Reform and Rural Development Services (PARRDS), Initiatives for International Dialog (IID), Task Force Detainees of the Philippines (TSDP), Alternative Community-Centered Organization for Rural Development (ACCORD), Philippine Human Right Information Center (Philrights), Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), tungo sa Kaunlaran ng Kanayunan at Repormang Pansakahan (KAISAHAN-sebuah organisasi sipil yang berjuang dalam membebaskan petani dalam segala bentuk diskriminasi), The Negros Center for People's Empowerment and Rural Development Foundation (NCPERD), Farmers Association of Davao City (FADC) dan organisasi komunitas lainnya.

Program intercambio di Filipina didanai oleh FIM (Frontier Internship Mission) Swiss melalui *La'o Hamutuk*.

Hasil yang telah dicapai

Selama intercambio di Filipina berlangsung, *La'o Hamutuk* dapat merumuskan berberapa aspek penting yang memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena agrarian reform, aspek-aspek tersebut antara lain:

(1) Pergerakan kaum tani, buruh, nelayan dan masyarakat adat sebagai basis pergerakan dalam mewujudkan agrarian reform di Filipina; dimana peserta mendengar, melihat dan berdiskusi secara langsung dengan organisasi-organisasi sipil masyarakat tentang pola pendekatan pengorganisasian, mobilisasi tani-buruh-masyarakat adat dan pengembangan kapasitas para pemimpin petani. Kemudian peserta ke basis-basis organisasi petani yang mereka organisasikan untuk melihat dan mendengar langsung tentang intervensi mereka di sana.

(2) Perubahan sikap politik para pemimpin Filipina dengan melahirkan Undang-Undang agrarian reform – Agrarian Reform Law/ARL; dalam hal ini peserta bertemu dengan beberapa orang anggota parlemen (congressman Members of Congress) dan Departemen agrarian reform daerah tentang skalasi kekuatan petani dan partai politik dalam merangsang perubahan kebijakan pemerintah.

(3) Peran organisasi sipil lintas sektoral dalam mengestimulasi implementasi UU agrarian reform secara menyeluruh (Comprehensive Agrarian Reform Program/CARP) sebagai follow-up implementasi CARL oleh pemerintah Filipina; peserta mendatangi organisasi-organisasi sipil masyarakat yang memberikan perhatian kepada implementasi program CARP dari sektor keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia, perburuhan, pen-



dampingan dan advokasi, pelayanan bantuan produksi dan pengembangan kapasitas tani.

(4) Perubahan pola gerakan organisasi sipil sebagai jawaban atas kebijakan politik internal organisasi dan individu; bahwa implementasi CARP telah berjalan cukup lama serta hal ini memaksa para organisasi sipil untuk memilih garis gerakan yang lebih familiar dengan petani dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan petani. Contohnya adalah ada beberapa individu atau kelompok yang keluar dari haluan politik kerasnya (kaum ekstrimis, rejections) ke kelompok sosial-demokrat (reaffirm).

(5) Gender dan peran peoples organizer/PO dan community organizer/CO terhadap perubahan pola pikir dalam memanfaatkan lahan pertanian yang telah di dipindahkan ke petani; dalam hal ini peserta lebih banyak melihat perubahan gerakan gender sebagai strategi feminists approach dalam mengangkat isu-isu yang lebih partisipatif dalam memperjuangkan kepentingan kaum tani dan buruh.

(6) Pengaruh multi-national cooperation/agensi internasional terhadap perubahan penguasaan dan peng-fungsian lahan pertanian; peserta melihat di beberapa tempat yang seharusnya ditetapkan kedalam program CARP dikuasai oleh multi-national cooperation dimana telah merubah struktur pertanian kearah kapitalisasi produk pertanian, seperti penyeragaman tanaman “monocarps” (perkebunan tebu, mangga, pisang, kopi dan lain-lain) untuk menyokong industri global. Petani yang seharusnya tuan daripada tanah pertanian menjadi buruh-buruh tani atau robot kapitalis dari ekspansioner perusahaan internasional di negara-negara dunia ketiga.

(7) Hubungan masyarakat adat (indigenous peoples) dengan kelestarian budaya lokalnya terhadap dunia luar. Hubungan keluar ini berkaitan dengan pertukaran budaya dan pasar produk lokal ke luar, pola hubungan seperti ini sering disebut dengan pola hubungan komersil. Tipologi Indigenous people’s merupakan salah satu tatanan masyarakat tradisional yang ada di Filipina dan sampai saat ini mereka masih terus memperjuangkan perlindungan terhadap struktur budaya lokal mereka. Eksistensi dan hak-hak dasar mereka telah dirumuskan dan dilindungi dalam satu undang-undang masyarakat adat “Indigenous People Republic Act/IPRA” pada tahun 1994.

La’o Hamutuk menilai bahwa, tujuh aspek ini cukup berat dan tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk dipelajari secara komprehensif dan mendalam, namun La’o Hamutuk percaya bahwa proses ini akan menjadi langkah awal pengenalan agrarian reform yang selanjutnya menjadi pegangan bagi para peserta intercambio dalam agrarian reform di Timor Leste di masa mendatang.

Pelajaran Berharga

Untuk menindaklanjuti apa yang telah diperoleh di Filipina, tentunya La’o Hamutuk dalam perencanaan model dan-strategi harus tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar yang dianut orang Timor Leste, sebab semuanya akan sia-sia belaka kalau tidak dapat mengukur tingkat kemampuan masyarakat, organisasi basis maupun kebutuhan dasar masyarakat saat ini dan ke depan.

Namun hal paling penting bagi La’o Hamutuk adalah bagaimana peserta mampu memberikan makna terhadap pesan-pesan berharga dari intercambio yang diterjemahkan dalam realitas hidup mereka. Adapun pelajaran yang cukup berharga yang diperoleh oleh peserta intercambio di Filipina adalah semangat pengorganisasian yang dilakukan oleh kekuatan populer terhadap para tani, buruh, nelayan dan-masyarakat adat pada saat pemerintahan kontroversial Presiden Ferdinand Marcos.

Semangat pergerakan damai “peaceful struggle” hingga kini masih hidup, hal ini dapat disimak dari mulut seorang petani yang cukup disegani oleh kelompok taninya, namanya Madam Loida Rivera (salah satu perempuan tani yang aktif sebagai aktivis tani dan peoples organizer di bawah Project Development Institute/PDI) seperti ini: “kami akan terus memperjuangkan masa depan anak cucu kami, oleh karena itu kami siap kembali turun jalan lagi, bukan untuk mencari uang dan makanan; sebab ruh revolusi masih tetap menjadi tujuan akhir, ketika demokrasi dan ke-tidakadilan di negeri ini masih sebagai mimpi kaum papa (baca: mimpi bagi mereka yang miskin dan tidak memiliki sumber-sumber mata pencaharian)”.

Semangat revolusioner ini dapat dimengerti sebab banyak saudara-saudara mereka belum memiliki tanah pertanian, walaupun implementasi Undang-Undang Agrarian Reform ini sudah berjalan selama 16 tahun. ❖

Siapakah Di La’o Hamutuk?

Staf La’o Hamutuk:

Ines Martins, Tomas (Ato) Freitas, Cassia Bechara, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Maria Afonso, Joaozito
Viana, Guteriano Nicolau, Alex Grainger

Dewan Penasihat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

Penerjemah Buletin Edisi ini: Andrew de Sousa, Selma Hayati

Foto Buletin Edisi ini: Dokumentasi Lao Hamutuk

RENUNGAN GEMPA TSUNAMI

mari kita renungi tragedi
tsunami ini,
adakah kesalahan ada pada diri
kita

atau Tuhan telah berbuat
sekehendakNya

mari kita simak semua benda
dan tubuh

tak bernyawa tergeletak pada
tempat yang sama

kemanusiaan kita telah ditegur
secara keras,
yang pertama mendapat petaka
si miskin tak berdaya

Tuhan, aku telah salah menafsir
hidup

bahwa hubungan kemanusiaan
lebih utama

ketimbang semata memuja
Engkau

Tuhan, aku bersumpah tak
akan lagi

mencari muka padaMu

sambil melupakan si miskin
yang tak berdaya

Banda Aceh, 4 Januari 2005

DIALOG TERAKHIR SEORANG TERORIS

orang-orang menuduhnya teroris

padahal maksudnya membasmi penindasan,

maka teroris itu diburu kekota-kota

kedesa-desa kegunung-gunung kebilik-bilik rumah

bahkan ketempat-tempat mana dia berada,

jalan-jalan penuh rambu-rambu

berbondong-bondong orang-orang bersenjata menyerbu,

senjata teroris itu hanya sepotong iman

maka teroris itu terus maju

di rimba menjelma singa

di desa menjadi biasa

di kota berubah rupa

dia merambah setiap penindasan

dengan sebilah pedang imannya

teroris itu terus diburu-buru

dideteksi ke mana arah adanya

terus diburu dengan sebuah perangkap

di sebuah tempat yang sunyi entah di mana

peluru menembus belakang punggung teroris itu

dia rebah sambil tangannya menggenggam sepotong tasbih

dengan nafas terakhir teroris itu berkata: "kezaliman itu penjajah,

penjajahan itu zalim, Allahu Akbar..."

bumi senyap sepotong

awan terbang hilang

Banda Aceh, 9 september 2002



Karya : Din Saja

La'ó Hamutuk Membutuhkan Anda!

Kami mencari aktivis-aktivis, baik internasional maupun Nasional untuk bergabung dengan kami.

Peneliti Nasional

- Hak Asasi dan Keadilan
- Institusi-institusi keuangan internasional

Peneliti Internasional

- Hak Asasi dan Keadilan
- Sumber Daya Alam

Masing-masing staf di La'ó Hamutuk bekerja secara kolaboratif dengan staf lain untuk meneliti dan melaporkan kegiatan institusi-institusi internasional dan pemerintah asing yang beroperasi di Timor Lorosae. Setiap staf berbagi tanggung jawab untuk administrasi dan program kerja, termasuk penerbitan Buletin dan Surat Populer, program radio, pertemuan-pertemuan publik, advokasi, pendidikan populer, koalisi dengan organisasi-organisasi Timor Lorosae lainnya, serta pertukaran kunjungan dengan masyarakat di negara-negara lain. Masing-masing staf bertanggung jawab untuk berkoordinasi paling tidak salah satu dari kegiatan-kegiatan utama *La'ó Hamutuk*.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai *La'ó Hamutuk*, lihat halaman belakang buletin ini atau website kami di www.etan.org/lh.

Syarat-syarat

- Latar Belakang Aktivistis, berpengalaman dan memiliki perspektif
- Punya komitmen untuk menjalankan proses pembangunan di Timor Lorosae lebih demokratis dan transparan
- Punya komitmen untuk saling berbagi pengetahuan dan membantu mengembangkan kemampuan staf-staf yang lain
- Bertanggungjawab, dengan etos bekerja keras dan bersedia bekerja bersama-sama dan kreatif dalam situasi kerja dengan latar belakang budaya yang beragam.
- Memahami dan bersedia untuk bekerja melawan diskriminasi gender
- Punya kemampuan menulis dan komunikasi verbal
- Punya kemampuan untuk menyampaikan informasi faktual dari laporan investigatif
- Sehat secara jasmani dan psikis
- Berpengalaman dalam salah satu bidang yang tertera di atas tersebut
- Pernah bekerja pada perkembangan internasional, penelitian kebijakan dan/atau diharapkan berpengalaman dalam solidaritas internasional

Syarat-syarat tambahan untuk staf internasional

- Fasih dalam menulis dan berbicara bahasa Inggris (yang diutamakan berbicara Bahasa Inggris sebagai bahasa utama/*native speaker*)
- Berkemampuan di bidang organisasi dan komputer
- Pengetahuan tentang sejarah dan politik Timor Lorosae
- Pernah tinggal dan bekerja di salah satu negara berkembang; dan berhasrat untuk hidup sederhana
- Fasih atau bersedia untuk belajar Bahasa Tetum
- Diharapkan berkemampuan berbahasa Indonesia dan Portugis

Syarat-syarat tambahan untuk staf Nasional

- Fasih berbahasa Tetum dan berbahasa Indonesia; serta berkemampuan menulis dan menerjemahkan kedua bahasa tersebut
- Memiliki pengetahuan dasar tentang organisasi dan bersedia untuk menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan tersebut
- Sangat diharapkan memiliki pengetahuan tentang investigasi, dengan kemampuan menulis berdasarkan fakta dan jelas
- Sangat diharapkan berkeahlian berbahasa Inggris dan Bahasa Portugis

Untuk pelamar, tolong sertakan dokumen-dokumen berikut ini ke kantor kami di Farol (Sebelah Perkumpulan HAK dan *Sahe Institute ba Libertasaun*) atau melalui e-mail ke: laohamutuk@easttimor.minihub.org

1. Surat lamaran dengan menuliskan alasan-alasan mengapa anda ingin bekerja dengan *La'ó Hamutuk*
2. *Curriculum Vitae (CV)*
3. Dua referensi profesional dari organisasi/majikan anda sebelumnya
4. Contoh tulisan mengenai proses pembangunan (satu halaman atau lebih)
5. Lowongan kerja ini kami buka hingga tanggal **2 Mei 2005**

Lamaran anda akan kami pertimbangkan setelah kami terima.



Karta Resposta husi UNDP ba *La'o Hamutuk* kona ba Artikulu RESPECT, Desembru 2004.

Uluk liu ha'u hakarak hato'o agradesimento barak ba La'o Hamutuk ninia interese ba Programa RESPECT nune'e mos konsulta intensiva nebe La'o Hamutuk halo ho funsionariu RESPECT antes atu hahu' draft artigu nebe temi iha leten. Ha'u apresia tebes ba faktus nebe fo sai husi ha'u nia kolegas sira nebe fomesse ba ita antes ne'e katak ida ne'e reflektu justu duni. Ha'u mos apresia tebes ba ita nia preokupasaun kona ba partisipasaun governo lokal, transparensia, responsabilidade no mos partisipasaun fetu nian, espesialmente iha kontesto atu hari nasaun foun hanesan Timor-Leste. Ha'u kompriende ita boot ninia preokupasoens hare ba katak Programa RESPECT lato'o atu bele fo resposta ba problemas fundamentais hirak ne'e. Ne'e duni, ha'u hakarak liu husi oportunitade ida ne'e atu hare metin ba preokupasaun hirak ne'e, hodi nune'e mos bele ajuda ema hotu nebe le'e atu kompriende didiak knar saida maka Programa RESPECT hala'o ona iha Timor-Leste.

Tuir saida maka ita hatene implementasaun programa RESPECT sai nuda'ar desafio boot ida. Programa RESPECT hanesan programa ida ke boot, ho ninia objetivos atu kria oportunitade moris diak nebe sustentavel ba membrus sosiadade nebe vulneravel tebes, hanesan eis-kombatentes no veteranos sira. Programa RESPECT iha ninia desafio esforsa tebes atu hetan objetivos hirak ne'e, progresivamente hare tuir programa hirak nebe hari tiha ona no mos usa hanesan lisaun hodi aprende liu tan. Programa RESPECT daudaun ne'e hakbesik ona atu kompleta ninia tinan rua implementasaun. Ha'u rekonhese katak iha mos parte balu nebe fraku liu-liu iha ninia fase inisial, meski nune'e, ha'u mos rekonhese katak programa ne'e konsege duni hala'o tuir dalam hodi hare ba problemas importantes nebe mosu iha ninia implementasaun, nune'e mos nia esforsu maka'as atu aumenta maksimalmente ninia impakto iha Timor oan nian moris, liu-liu ba sira nebe terus ona durante tinan rua nulu resin hat ninia laran iha luta ida ne'e.

Tuir ita nia observasaun nebe ita boot halo iha ita nia artigu ne'e, iha estruktura Programa RESPECT iha komisoos nebe hala'o desizaun, hanesan Komisaun ba Diresaun Programa (PSC) nian, Komisaun ba Trabalho Projeto (PWC) nian no mos Komisaun Distrital RESPECT (DRC) nian, nebe halao ida-ida nian knar, no mos iha representantes Governo nian. Partisipasaun funsionariu RESPECT iha komisaun ne'e hodi fomesse deit apoiu teknika no mos ba funsaun sekretariadu. PSC, PWC no mos DRC iha nivel diferentes (rua uluk iha nivel nasional no ida ikus iha nivel distrital) hodi hato'o ka hala'o estrategias no regulamento hodi supervisona Unidade Implementasaun Projeto (PIU) nian, ida nebe fo dalam ezekusaun ba desizaun nebe komisaun tolu ne'e halo. Estruktura ida ne'e iha tiha ona no lao daudaun atu asegura sentido responsabilidade ba programa ne'e husi Governo.

Sentido responsabilidade tomak husi parte ba programa RESPECT atu asegura liu-liu iha proseso aprovasaun projetus mikro ba alokasaun fundus. Iha nivel distrital, DRC, nebe Administrador do Distrito maka nudar chefe, aprova fundus ba proposta husi projetos mikro hirak ne'e, nebe comunidade rasik maka hatama, hodi nune'e programa ne'e bele fo resposta diak liu ba nesidade grupo vulneravel iha sosiadade nia laran. Avaliasaun ba proposal projetos mikro sira ne'e liu hosi DRC laos arbiru deit maibe liu hosi kriteria ida nebe estabese tiha ona. Iha nivel nasional proseso alokasaun fundus kontrola husi PWC nebe Vice Ministro Dezenvolvimento No Ambiente rasik nudar chefe hamutuk ho Sekretariadu de Estado ba Trabalho no Solidariedade, selae liu husi sira ninia representantes. Proposta projeto mikro husi Ministerio ida-idak sei hetan avaliasaun husi PWC bazeia ba kriteria nebe estabese tiha ona no mos alokasaun fundus ba projetus hirak nebe konsidera hanesan prioridade.

Importante tebes atu klarifika iha ne'e katak, meski alokasaun fundus DRC maka responsabiliza iha nivel distrital no PWC iha nivel nasional ba projeto mikro ne'e administrasaun fundus hirak ne'e PIU RESPECT maka sei halao; katak PIU maka sei transfere fundus direitamente ba Ministerios no DRC bainhira projetos mikro ne'e hetan tiha ona aprovasaun. To'o ohin loron, 1.300.000 dolar amerika gasta tiha ona ba projetos mikro iha nivel distrital (Distritu ida hetan 100.000 dolar amerika), 1.287.193 dolar amerika (nebe representa 99% total fundus) alokado tiha ona hosi DRC ba finansia projetos mikro iha comunidade. Hosi distritu sanulu resin tolu, distritu sia (9) maka aloka/utiliza tiha ona 100.000 dolar amerika nebe gasta desde hahu'u. Fundus nebe sei iha maka 12.807 dolar amerika sei utiliza/aloka ba projeto husi DRC distritu Baucau, Viqueque, Lospalos no Ermera nebe sei ramata iha fulan Maio nia laran. Iha nivel nasional, total 1.184.083 dolar amerika aloka tiha ona ba projetos nivel nasional liu husi PWC.

La'o Hamutuk iha pontu de vista nebe klaru katak programa RESPECT iha komitmento tuir duni nia prinsipio kona ba transparensia no responsabilidade. Meski nune'e, preokupasoens sei iha kona ba mekanismu nebe presija atu asegura katak prinsipio transparensia no responsabilidade halao dunik ona. Kona ba mekanismu hirak ne'e ha'u hakarak klarifika katak proseduras barak nebe UNDP tau iha fatin atu bele asegura transparansia no responsabilidade iha kontesto implementasaun Programa RESPECT. Proseduras hirak ne'e maka La'o Hamutuk konsidera hanesan '*estruktura desizaun birokratiko*', tamba ida ne'e hanesan inkonforto no mos naruk tuir saida maka ita hare, hirak ne'e maka mekanismu ida deit maka bele garantia ba programa ne'e atu implementa ho transparensia ho responsabilidade. Tamba ne'e maka iha trade-off entre oin sa atu fo garantia katak prinsipius hirak ne'e sei aplika no mos nivel komplekso hosi proseduras birokratiko nebe tenke hala'o.

Tuir saida mak ita hatene tiha ona, Programa RESPECT formula atu fo resposta ida ba proposta hosi Governu atu fo apoiu ba comunidade, iha fulan Agosto 2002, atu bele hare ba nesidades nebe boot liu iha grupus vulneraveis, hanesan eis-kombatentes. Formulasuun programa ida ne'e sura mos ba situasaun iha tempo neba, nebe Senhor Presidente da Republika estabese Komisaun rua atu defini no identifika se los maka Veteranus no Eis-kombatentes hosi resistensia durante tempu luta. Iha kontesto ida ne'e definisaun ba eis-kombatentes seidaun bele atu adopta independentemente hosi Komisoos Presidenciais rua ne'e. Tamba iha nesidade boot ida para atu fo resposta la-laisba problemas membrus comunidade nebe vulneravel tebes, hanesan eis-kombatentes, e tamba labele hein to'o Komisoos hirak ne'e kompleta sira nia servisu, maka Programa RESPECT hato'o ninia proposta atu adopta mekanismu identifikaun hosi comunidade, hodi nu ne'e timor oan tomak bele identifika lolos individus nebe vulneravel nebe moris iha comunidade idak-idak nia laran. Mekanismu identifikaun hosi comunidade ne'e mos aplika ba partisipasaun fetu nian. Programa RESPECT mos buka atu hala'o promosaun ba partisipasaun fetu nian, tamba ne'e maka Programa ne'e hatur responsabilidade boot ida iha comunidade nian kbaas atu envolve fetu sira iha implementasaun ba projetos mikro nebe hetan fundus. Nune'e duni, importante tebes atu klarifika katak partisipasaun fetu nian nuda'ar kriteria ida nebe kona duni ba saida maka DRC sira hala'o selesaun ba proposal projetos mikro nian. Ita presija hatene katak partisipasaun fetu sira laos deit hare hosi numeru ka kuantidade grupu fetu nebe hetan fundus liu hosi programa ne'e; hanesan ejemplu ida, fetu sira mos halo parte grupus comunidade nian nebe mane sira mak hanesan chef. Ba ita boot nia informasaun, liu husi Programa RESPECT nian registu preliminaru katak numeru total beneficiariu projeto ne'e maka 306.476, i husi numeru total ne'e ema fetu nain 149.519 (ne'e representa 49% husi numeru total). Numeru total ida ne'e iha mos ema nebe hetan servisu liu husi Programa RESPECT no mos hetan treinamentu oi-oin, no mos comunidade sira nebe hetan benefisiu indiretu liu husi implementasaun projetus mikro RESPECT nian, hanesan asesu ba infrastruktura foun iha nivel nasional no mos distrital.

Naheed Haque
Country Director

Uluk nanain, ami hatõ'o obrigado ba UNDP nebe fo atensaun no resposta ba artikulu nebe *La'õ Hamutuk* fo sai liu husi Buletin La'õ Hamutuk Volume 5, No. 4-5 iha fulan Otubru 2004. Ami rekonyese katak pontus balu mak ita boot sira nia observasaun ba Artikulu ne'e los. Maibe ami presiza fo ami nia komentariu fila fali la'os atu defende an maibe atu halo klarifikasaun, hanesan tuir mai ne'e:

- Ita bot rekonyese katak ami halo duni intervista ho staf programa RESPECT, ne'e los duni. Maibe mos klaru katak ami halo intervista ho ema barak tan, hanesan Ministru balun mak involve iha Programa RESPECT no ema balu husi Sefi Suku sira, eis-FALINTIL sira no komunidadade balun iha Distritu Dili, Liguisa, Ermera, Manatuto, Baucau no Aileu.

- Kona ba sistema birokratiku, ita boot dehan katak ida ne'e dalam ida deit atu garantia transparansia no akuntabilidade. Tuir ami nia hanoin katak sei iha dalam seluk atu garantia transparansia no akuntabilidade, hanesan involve komunidadade iha baze (husi nivel Aldeia no Suco)

rasik iha prosesu foti desizaun, implementasaun no monitoriu. Iha parte seluk, UNDP presiza esplika ba komunidadade katak tambasa prosesu sai kleur. Tuir ami nia komprensaun kona ba Transparansia no Akuntabilidade katak tenki iha mos mekanismu nebe diak atu fahe informasaun ba komunidadade, nune komunidadade sira bele hatene no komprende prosesu tomak nebe hala'o.

- Kona ba partisipasaun fetõ, los katak la bele hare partisipasaun husi kuantidade deit. Maibe, wainhira ami halao intervista ho representante fetõ sira iha Distritu nebe mak ami visita, sira dehan katak sira la involve barak iha prosesu desizaun no implementasaun. Dala ruma fetõ sira nia naran iha projetu laran maibe iha realidade sira la involve. Tuir ami nia komprensaun katak involvimentu fetõ la'os atu hetan serbisu liu husi projetu nebe iha, maibe fetõ tenki mos involve iha prosesu foti desizaun no tenki sai mos implementador projetõ. Ida ne'e mak ami hare katak menus iha programa RESPECT. ❖

Berita singkat ...

Aliansi Nasional Timor Leste Untuk Pengadilan Internasional

Pada tanggal 11-februari-2005, Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional mengadakan diskusi panel dengan tema: “**Hakarak Halis ba Nebe Komisaun Verdade no Amizade ne'e ?**” Diskusi berlangsung selama satu hari di Aula CAVR Dili. Sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah : Vicente Faria dari Fraksi Fretelin, Tiago Sarmiento sebagai praktisi

Hukum, Nugroho katjasungkana dari CAVR dan Maria Afonso dari Aliansi Nasional yang juga mewakili keluarga korban.

Peserta yang berpartisipasi dalam diskusi panel ini terdiri dari : Organisasi non pemerintah , Keluarga korban dari masing – masing distrik yaitu : Viqueque, Lospalos, Manatuto, Suai, Ermera, Liguisa, Maliana, Baucau dan Dili, Pelajar dan Mahasiswa dari Undil, Unpaz, UNTL, UNIMAR, anggota parlemen dan individual lainnya. Jumlah partisipan yang hadir dalam diskusi panel tersebut seratus orang peserta.

Kesimpulan terakhir dari diskusi panel tersebut adalah; membuat kesepakatan bersama untuk menyatakan kepada publik dan pemerintah bahwa kami tidak setuju dengan proposal dari pemerintah untuk merealisasikan **komisi persahabatan dan Kebenaran**, karena tidak memberikan keadilan kepada korban kejahatan kema-nusiaan akan tetapi hanya memberikan kekebalan Hukun/ rantai impunitas kepada pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan. ❖



Workshop Nasional Agrarian Reform

Pada tanggal 17 - 18 Februari 2005, delegasi intercambio Filipina bersama Working Group Land and property NGO Forum dan melibatkan Mahasiswa mengadakan **Workshop Nasional untuk Agrarian Reform** selama dua hari di Kampus Universitas Dili (UNDIL). Workshop ini mengambil tema: **Politik agraria untuk pembangunan berkelanjutan di Timor-Leste**. Dengan menghadirkan pembicara dari: pemerintah (land and property), Petani dari Distrik Ermera, ARD (association rural development) sebuah institusi untuk drafting undang-undang pertanahan yang dibiayai oleh USAID, aktivis internasional dan beberapa aktivis nasional. Workshop ini terbuka dan dihadiri juga kelompok-kelompok tani dari 12 Distrik, para aktivis pro-demokrasi, mahasiswa dan pelajar. Sebanyak 154 orang dari 36 kelompok tani dan organisasi sipil masyarakat yang mengikuti workshop ini.

Hari pertama workshop ini mendapat antusiasme yang cukup besar dari peserta, hal ini dapat dilihat ketika dalam session Tanya jawab. Peserta workshop lebih banyak bertanya seputar agrarian reform di negara lain, konsep, pemikiran, undang-undang agrarian reform dan rekomendasi-rekomendasi gerakan agrarian reform ke depan. Kemudian pada hari kedua workshop, bersama-sama dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok petani dan organisasi non-pemerintah merumuskan strategi dan rencana aksi guna mengestimulasi gerakan agrarian reform di Timor Leste.

Dalam kesempatan ini panitia gunakan untuk melakukan konsolidasi petani dan organisasi-organisasi yang selama ini memberikan perhatian terhadap masalah pertanahan di Timor Leste. Pesan yang terpetik dari workshop nasional ini adalah bagaimana merekonstruksi gerakan tani yang selama ini tersporadisasi. Target selanjutnya adalah membangun kolektifitas gerakan tani, mahasiswa dan masyarakat sipil dari bawah. ❖

Pembangunan Kembali Aceh Pasca Tsunami

Pada tanggal 7-9 Februari 2005 diadakan sebuah Workshop di Medan mengenai “pembangunan kembali Aceh dalam perspektif masyarakat sipil”. Workshop tersebut difasilitasi oleh LSM-LSM internasional dan juga nasional. Tujuan dari workshop tersebut adalah untuk mengembalikan dan memperbaiki tatanan hidup masyarakat Aceh yang hancur karena gempa tektonik dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh.

Peserta workshop terdiri dari sepuluh wakil dari komunitas yang daerahnya dilanda gempa tektonik dan gelombang Tsunami, ada beberapa kelompok aktivis Aceh yaitu LSM-LSM di Indonesia ikut ambil bagian dalam kesempatan ini. Selain itu hadir juga peserta dari luar Indonesia, seperti dari Forum Asia Bangkok, CAFOD England dan juga dari Timor-Leste

Dalam pertemuan tersebut, adalah untuk mendengarkan dan mendiskusikan laporan terakhir tentang situasi di Aceh serta perkembangannya. Laporan tersebut disampaikan oleh kesepuluh wakil dari komunitas yang hadir pada pertemuan itu. Para komunitas mempresentasikan kondisi wilayahnya masing-masing yaitu mulai dari jumlah penduduknya, baik yang menjadi korban atau yang hilang, yang mengungsi hingga kondisi ekonominya, kondisi wilayahnya, aksesnya terhadap bantuan, hingga situasi keamanannya. Setelah presentasi, peserta workshop mencoba mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada dan merumuskannya dalam program jangka panjang yang sederhana mungkin.

Kehadiran Timor-Leste dalam pertemuan tersebut dianggap sangat penting dan sangat membantu sekali masyarakat sipil di Aceh, dalam hal ini untuk ikut membagi pengalaman Timor-

Leste selama masa pasca referendum dan pada masa transisi. Kemudian membagi juga pengalaman Timor-Leste menyangkut institusi-institusi internasional seperti: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), institusi keuangan internasional, Agensi PBB, serta LSM-LSM internasional, serta pengalaman Timor-Leste dalam mengembalikan para pengungsi pasca 1999.

Ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh pertemuan tersebut yaitu antara lain adalah:

1. Sangat dibutuhkan sesegera mungkin mendirikan sebuah institusi monitoring dan analisa contohnya seperti “La’o Hamutuk” guna memantau institusi-institusi internasional yang sekarang ini berada di Aceh.

2. Perlunya pemdampingan bagi para pengungsi yang sekarang masih berada di kamp-kamp pengungsi untuk segera kembali ke tempat asalnya.

3. Palam merekonstruksi kembali Aceh haruslah berdasarkan keinginan dan kemauan mayoritas rakyat Aceh, bukan berdasarkan keinginan segelintir elit politik di Jakarta.

4. Menyelesaikan kasus Aceh jangan hanya berdasarkan masalah kemanusiaan tetapi juga harus berdasarkan nilai sejarah dan budaya rakyat Aceh, artinya konflik politik yang berkepanjangan harus ditinjau kembali dan mencari solusinya.

Masyarakat Aceh tidak mau dinilai tidak bisa melakukan apa-apa hanya karena dianggap trauma terhadap gempa tektonik dan gelombang tsunami. Sebaiknya masyarakat internasional dan elit-elit di Jakarta mempercayakan pembangunan kembali Aceh di tangan masyarakat Aceh sendiri. ❖

Pernyataan Solidaritas dari *La'õ Hamutuk*: Mengenai Pemogokan Kaum Buruh di Central Maritime Hotel



Pemogokan sekitar 71 orang buruh dari Hotel Central Maritime yang dimulai sejak Sabtu, 12 Maret 2005 hingga sekitar 22 Maret 2005, merupakan sebuah aksi kekuatan, karena sangat signifikan bagi masa depan kaum buruh di Timor Leste. Menjadi harapan kami bahwa, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut bisa berjalan berdasarkan prinsip keadilan yang pantas bagi rakyat dan kaum buruh di Timor Leste.

Berdasarkan kenyataan aktual bahwa adanya angka pengangguran yang tinggi di negara ini, diskusi-diskusi reguler terus diadakan dengan diciptakannya “Zona Produksi Ekspor” di Timor Leste oleh pemerintah, dengan demikian Bank Pembangunan-

Asia, IMF dan Bank Dunia pun terus mendorong dengan cepat proses tersebut, dalam rangka mempermudah privatisasi sektor investasi. Kami memiliki perhatian yang mendalam tentang ketidakpedulian dan kehancuran atas kondisi yang layak serta hak-hak kaum buruh. Dalam pedoman buruh internasional dan dalam undang-undang perburuhan Timor Leste tercantum bahwa jam kerja maksimum perhari adalah 8 jam dan 44 jam per minggunya.

Sedangkan, sejak 2002 para buruh Hotel Central Maritim dipekerjakan 48 jam per minggu tanpa pembayaran jam lembur. Setelah mengadakan beberapa kali negosiasi dengan pihak manajemen, akhirnya keputusan pihak perusahaan adalah mengurangi jam kerja dan juga membayar upah lembur kepada para buruh. Tidak ada perusahaan, juga majikan, yang diperbolehkan untuk melanggar ketentuan hukum tersebut.

Sebagaimana komitmen *La'õ Hamutuk* untuk mempromosikan keadilan dan upaya-upaya partisipatif dalam hal rekonstruksi dan pembangunan di Timor Leste, kami menyerukan kepada para buruh di Hotel Central Maritime untuk mengambil langkah berdasarkan hukum tersebut dalam menuntut hak-haknya.

Komunitas internasional di Timor Leste turut bertanggung jawab dalam menegakkan hak-hak buruh, juga institusi-institusi internasional, termasuk perusahaan dan korporasi multinasional. Kami berharap agar Hotel Central Maritime untuk bertanggung jawab sebagai sebuah perusahaan multinasional yang memiliki banyak buruh di Timor Leste untuk dapat menjamin hak-hak para buruhnya. ❖

Pernyataan Sikap: Front Rakyat Pembela Keadilan

Hari ini, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di negara kami, Timor-Leste.

Empat Belas tahun yang lalu, pada tanggal 12 November 1991, di tempat ini (Santa Cruz, Dili) terjadi sebuah tragedi, pembantaian terhadap pemuda Timor-Leste oleh para militer Indonesia dibawah perintah Panglima Tertinggi ABRI, Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika itu, Kay Rala Xanana Gusmão, presiden RDTL sekarang, adalah Panglima tertinggi FALINTIL.

Kunjungan kali ini merupakan kunjungan yang ketiga setelah Presiden Gus Dur dan Megawati Sukarno Puteri datang ke bumi Timor-Leste sejak Timor Leste membebaskan diri dari rezim diktator Jenderal Soeharto. Melalui penyambutan ini, kami ingin menyampaikan refleksi dan aspirasi kami sebagai rakyat dari sebuah bangsa yang pernah dijajah oleh Pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru, yakni:

- Mendukung sepenuhnya hubungan persahabatan yang adil dan setara antara kedua negara berdaulat, Timor-Leste dan Indonesia. Kami juga mengharapkan agar persahabatan tidak hanya terbatas pada para elit politik kedua negara, namun haruslah meluas ke persahabatan antara rakyat kedua negara.
- Dukungan kami, tidak berarti Pemerintahan INDONESIA sekarang harus melestarikan kekebalan-/impunity bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang kini masih bebas berkeliaran di Indonesia.

- Persahabatan yang dibangun sekarang haruslah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan menghormati sepenuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, persahabatan tidak seharusnya dibangun bersama dengan para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang sesungguhnya telah melanggar konstitusi kedua negara dan deklarasi HAM universal.

- Keadilan bagi para korban dan menyeret para pelaku kejahatan ke pengadilan adalah juga merupakan tanggungjawab pemerintahan ke dua negara. Kami juga menuntut agar kedua negara bisa bekerjasama dengan PBB dan komunitas internasional untuk mendirikan sebuah pengadilan yang benar-benar independen dan kredibel bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Usulan kami adalah sebuah pengadilan internasional !!!

Melestarikan Impunitas terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan adalah juga penghianatan dan pembusukan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami mengharapkan dengan kunjungan ini, Bapak Presiden Republik Indonesia dapat menjadikannya sebagai sebuah kunjungan refleksi bagi guna penegakkan keadilan di masa datang.

Sekian dan terima kasih.

Cemiterio Santa Cruz, 9 April 2005

Pada tanggal 2 dan 3 Februari, Bank Dunia menyelenggarakan Pertemuan Pelaksanaan Transparansi Industri-Industri Bahan Baku (EITI), di Paris, Perancis. EITI didirikan pada Bulan Juni 2003, di London, Inggris, dengan tujuan "menambah transparansi pembayaran-pembayaran dan pendapatan-pendapatan dalam sektor bahan-bahan baku di negara-negara yang sangat tergantung pada sumber-sumber daya ini". Hampir dua tahun kemudian, pertemuan di Paris diperkirakan untuk menilai pelaksanaan prinsip-prinsip EITI di banyak negara yang menandatangani, Timor-Leste salah satunya.

Bank Dunia mengundang seorang wakil dari *La'o Hamutuk* untuk membuat presentasi mengenai pelaksanaan EITI di Timor-Leste hingga sekarang ini. *La'o Hamutuk* menolak undangan untuk beberapa alasan, termasuk waktu dan keterbatasan staf, tetapi juga karena kami tidak yakin bahwa Bank Dunia dan para pembuat keputusan EITI tertarik dengan perspektif masyarakat sipil yang berbeda dengan pandangan-pandangan mereka yang berlaku sekarang. Dalam pengalaman kami dengan pertemuan-pertemuan Bank Dunia, kami mengamati bahwa Bank Dunia seringkali menggunakan masyarakat sipil untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan mereka sendiri, dengan perhatian yang rendah untuk keikutsertaan yang sesungguhnya.

Akan tetapi, *La'o Hamutuk* menyiapkan sebuah makalah berjudul *Transparansi Industri-Industri Bahan Baku di Timor-Leste: Keterbatasan-Keterbatasannya di dalam Praktek*, yang dibagikan selama pertemuan oleh kawan-kawan dari organisasi *Global Witness*. Dalam makalah ini, *La'o Hamutuk* membagikan ide dan perhatian-perhatiannya mengenai keefektifan (atau sebaliknya) pelaksanaan prinsip-prinsip EITI di Timor-Leste hingga sekarang, juga persoalan-persoalan dengan langkah-langkah yang didiskusikan oleh Pemerintah Timor-Leste.

EITI Tidak Cukup

La'o Hamutuk mendukung tujuan-tujuan transparansi dan pertanggungjawaban EITI. Kami berbagi pemahaman bahwa mereka perlu untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam sebuah bangsa menguntungkan rakyatnya dan untuk mencegah uang dicuri oleh perusahaan dan pejabat pemerintah yang korup. Akan tetapi, langkah-langkah sebagian kesukarelaan EITI tidak mencukupi apa yang dibutuhkan. Tentu saja transparansi penting, tetapi transparansi seharusnya diperintahkan. Para pemerintah harus menyebarluaskan pendapatan-pendapatan mereka, tetapi para perusahaan juga harus bertanggungjawab. Demokrasi penting di tingkat nasional, tetapi keterlibatan dan berbagi pendapatan di tingkat masyarakat dan lokal juga perlu.

Pada saat yang sama, transparansi dan pertanggungjawaban perlu tidak hanya untuk para pemerintah negara-negara miskin, tetapi juga untuk para pemerintah negara-negara kaya dan para perusahaan besar. Beberapa kejahatan keuangan yang tersebar luas dalam tahun-tahun belakangan ini melibatkan para pejabat tinggi perusahaan minyak Eropa dan Amerika Serikat, juga PBB. Penindasan dan korupsi di negara-negara produksi minyak dunia ketiga seringkali dimulai, difasilitasi, atau dieksploitasi oleh para perusahaan minyak yang berkedudukan di negara-negara kaya. Kami meminta sebuah keterikatan, rejim dunia yang mensyaratkan tidak hanya transparansi dan pertanggungjawaban, tetapi penghormatan bagi demokrasi, lingkungan lokal dan global, kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan hak asasi manusia.

Salah satu prinsip EITI '*mengakui bahwa pencapaian transparansi yang tinggi harus dirancang dalam konteks penghormatan bagi kontrak-kontrak dan hukum.*' Kami menaruh perhatian bahwa prinsip ini membolehkan keberadaan, kontrak-kontrak rahasia dan ketinggalan jaman, hukum yang anti demokrasi terhadap informasi yang tersembunyi dari publik. Jika EITI selayaknya efektif, EITI harus menolak praktek-praktek yang saat ini mentolerir sebuah lingkungan yang buram dimana korupsi dan salah penggunaan uang.

EITI adalah sebuah langkah kecil dalam arah yang benar. Tetapi, jika EITI menjadi sebuah pengganti langkah-langkah yang berarti, sebuah pembenar untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang murni efektif yang mungkin tidak nyaman bagi para perusahaan tambang atau para negara pemakai minyak, ini akan menjadi salah satu bencana terhadap masyarakat umum seperti warga negara Timor-Leste. Kita harus melangkah karena langkah-langkah kecil EITI untuk melaksanakan kontrol-kontrol yang diperintahkan terhadap para perusahaan minyak dan perekonomian pemakai minyak untuk melindungi generasi sekarang dan masa mendatang di negara-negara produksi minyak, juga kehidupan masa depan planet kita.

Timor-Leste dan EITI: Praktek Prinsip yang Mengecewakan

Selama konferensi pendirian EITI, hampir dua tahun lalu, PM Mari Alkatiri menyatakan bahwa: "Kami mengakui bahwa kesuksesan tidak hanya datang dengan pemerintahan yang baik..." "Budaya kelembagaan yang kuat dan pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai melalui pertanggungjawaban dan transparansi di semua tingkat Pemerintah dan sektor publik."

Sekarang ini Timor-Leste mengembangkan perundang-undangan minyaknya, dan secara jelas Pemerintah mempunyai kesulitan-kesulitan untuk melaksanakannya dan

melaksanakan tujuan-tujuan transparansi dan pertanggungjawaban EITI di dalam praktek. Tujuan-tujuan EITI mensyaratkan keterlibatan masyarakat sipil, juga pembuatan keputusan yang terbuka dan demokratis.

La'o Hamutuk mempunyai rekomendasi-rekomendasi-nya dengan lengkap untuk Sistem Hukum Minyak dan Dana Minyak dalam dua submisi yang panjang kepada Pemerintah di akhir 2004 (*lihat submisi-submisi La'o Hamutuk dalam website kami: www.etan.org/lh.*) Meskipun submisi-submisi kami menyebutkan EITI, kami merekomendasikan banyak langkah-langkah yang lebih keras dan khusus untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban.

Salah satu prinsip EITI adalah bahwa "sebuah pemahaman publik yang terbuka atas pendapatan-pendapatan pemerintah selama ini dapat membantu debat publik dan menginformasikan pilihan-pilihan yang cocok dan sesuai kenyataan bagi pembangunan yang berkelanjutan." Sayangnya, Pemerintah Timor-Leste, juga banyak para pemerintahan negara-negara produksi minyak, sangat dipengaruhi oleh para perusahaan minyak, hasrat pendapatan sesegera mungkin, para pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional, dan tekanan-tekanan kuat yang seringkali melebihi keinginan, hak-hak dan kepentingan-kepentingan terbaik masyarakat umum, khususnya dalam jangka panjang. Perdana Menteri Timor-Leste ingin mengeluarkan perijinan-perijinan minyak dalam 10 bulan, dan sebagai hasil, Pemerintah mempercepat pembuatan undang-undang tanpa melalui konsultasi atau debat publik. Mereka mengontrak dan melaksanakan eksplorasi yang berkaitan dengan gempa bumi sebelum hukum-hukum yang relevan telah diberlakukan.

Pemerintah mengklaim bahwa sebuah "konsultasi publik yang seksama" dilakukan terhadap rancangan perundang-undangan untuk mengelola dan mengembangkan pajak minyak. Dalam kenyataan konsultasi ini jauh dari seksama, dan lebih dekat ke sosialisasi daripada konsultasi yang sesungguhnya.

Rancangan Undang-Undang Minyak mencerminkan sebuah prioritas memfasilitasi pembangunan minyak, tak terkekang oleh perlindungan lingkungan yang penting, konsultasi masyarakat, keterikatan yang kompetitif dan diperintahkan

terbuka, cek dan keseimbangan, transparansi, konsultasi, pertanggungjawaban atau praktek yang demokratis.

Hingga hari ini, bahkan setelah Dewan Menteri menyetujui rancangan Undang-Undang, publik dan Parlemen belum diijinkan untuk melihat versi yang telah diperbaiki, meskipun Parlemen akan diminta untuk "mengesahkannya" dalam beberapa minggu dekat. Setelah *La'o Hamutuk* mengulangi permohonannya untuk melihat perundang-undangan yang telah diperbaiki, Menteri Perminyakan Sementara José Teixeira mengatakan kepada kita bahwa: "*Sekali sebuah rancangan undang-undang telah dikirimkan ke Parlemen, penyebarluasan rancangan undang-undang itu ke masyarakat umum atau sebaliknya adalah persoalan bagi Parlemen.*"

Sayangnya proses perancangan Dana Minyak telah lebih transparan dan banyak konsultasi daripada Sistem Hukum Minyak, meskipun kami prihatin bahwa proses ini terlalu banyak dipengaruhi oleh para ahli internasional dari negara-negara kaya, seringkali dengan pengalaman yang terbatas atau berat sebelah (*lihat Editorial di hal XX*). Pola pertemuan-pertemuan konsultasi publik masih cenderung menuju sosialisation, meski prosesnya diawali dalam tahap awal, sebelum undang-undang dirancang. Meskipun ada perubahan sedikit dari apa yang diperdebatkan dalam bahan diskusi ke rancangan undang-undang yang sempurna, submisi-submisi dan rancangan undang-undang siap disebarluaskan terbuka untuk umum. Proses konsultasi yang lain telah diadakan sebelum rancangan undang-undang dikirimkan ke Dewan Menteri, dengan lebih banyak kesempatan untuk submisi-submisi dan perbaikan-perbaikan baru. Kami yakin proses konsultasi publik adalah sebuah langkah awal bagi Pemerintah untuk membuktikan bahwa "transparansi" dan "konsultasi publik" tidak akan dilaksanakan hanya dengan melaporkan kata-kata sebagai mantra-mantra, tetapi melalui pelaksanaan nyata.

(Makalah *La'o Hamutuk Extractive Industries Transparency in Timor-Leste: Limitations in Practice* tersedia di website kami: www.etan.org/lh). ❖

Editorial: Solidaritas Tsunami (*sambungan dari halaman 20*)

Bantuan dan Faham Perebutan Kesempatan

Dari seluruh sudut dunia, lembaga-lembaga bantuan, PBB, pemerintah dan aktifis solidaritas datang menolong mereka yang bertahan dari tsunami. Kekuatan militer asing memberikan bantuan yang tak ternilai dalam mencapai wilayah-wilayah pedalaman. Banyak tentara dan pekerja bantuan asing tidak sadar permusuhan antara masyarakat Aceh dan Pemerintah Indonesia. Mereka berpikir

pembatasan-pembatasan Pemerintah Indonesia pada kerja-kerja mereka merupakan hasil dari rasa nasionalisme atau tidak berterima kasih, tetapi sebenarnya TNI menggunakan para pekerja asing untuk memfasilitasi kontrol mereka terhadap masyarakat Aceh.

Meskipun pada awalnya Jakarta menentang bantuan asing, Pemerintah Indonesia segera menyadari bahwa Indonesia tidak dapat mengatur bencana ini tanpa bantuan dari luar

negeri. Beberapa pejabat resmi memimpikan kemungkinan korupsi dalam pemasukan bantuan dalam jumlah besar. Sejak awal Januari, korupsi telah dilaporkan secara luas.

Di tingkat internasional, Jakarta dan Washington ingin mengeksploitasi tsunami untuk memulihkan hubungan militer penuh antara Indonesia dan Amerika Serikat. Beberapa latihan militer dan penjualan persenjataan masih dilarang oleh Kongres Amerika Serikat, karena kekejaman Indonesia dan impunitas di Timor-Leste dan Papua Barat. Tetapi tsunami tidak mengubah catatan hak asasi manusia TNI, dan Washington masih perlu menahan diri menyediakan alat-alat untuk membuat penindasan TNI lebih efektif.

Tsunami juga memberikan militer Amerika Serikat sebuah kesempatan untuk beroperasi dari kapal tanpa fasilitas-fasilitas di darat. Cukup menarik, banyak serangan bersenjata pendudukan atas Irak dilakukan dari kapal-kapal di Teluk Persia. Meskipun Aceh adalah operasi kemanusiaan, kemampuan terbaru telah dikembangkan untuk perang antar negara di masa depan, karena negara-negara yang enggan untuk mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka semakin bertambah.

Untuk Cinta Pemerintah

Para pemerintah di seluruh dunia, ditekan oleh warga negara mereka, menjanjikan uang untuk membantu mereka yang selamat dari tsunami. Timor-Leste memberikan \$50.000 kepada PBB untuk bantuan kemanusiaan, yang setara dengan Pendapatan Domestik Bruto per 94 menit. (dengan perbandingan, Amerika Serikat menjanjikan \$350 juta adalah Pendapatan Domestik Bruto mereka per 15 menit). Bank Dunia dan IMF mengizinkan Indonesia untuk menunda pembayaran-pembayaran hutang mereka selama tiga bulan.

Kedermawanan seperti ini dapat memampukan masyarakat Aceh untuk membangun kembali kehidupan dan masyarakat mereka. Tetapi penundaan hutang dan banyak bantuan tidak sampai ke masyarakat Aceh, tetapi sampai di Pemerintah Jakarta. Operasi Cinta (*Operasoun Domin*) Presiden Xanana Gusmao mengumpulkan \$77.000 dari masyarakat Timor-Leste bagi para korban tsunami, dan kemudian dipersembahkan sebagai sebuah hadiah pribadi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sepengertian kita, SBY dan keluarganya tidak menderita karena tsunami. Operasi Cinta mengambil keuntungan dari tragedi yang menimpa masyarakat Aceh untuk menjilatkan muka Pemerintah Timor-Leste dengan Indonesia. Tetapi para pemerintah tidak mencintai, mereka hanya mempunyai hubungan diplomatik. Hubungan antar pemerintah hanya berdasarkan kepentingan mereka sendiri, berbeda dengan

perasaan manusia untuk saling mempercayai, kasih-sayang dan kedermawanan.

Solidaritas yang Murni

Solidaritas yang sesungguhnya adalah dari masyarakat ke masyarakat. Solidaritas ini membangun komunikasi dan dukungan antara masyarakat negara lain dan masyarakat Aceh. Solidaritas seperti ini dapat difasilitasi oleh organisasi-organisasi masyarakat basis, tetapi bukan oleh pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga internasional.

Setelah tsunami terjadi, para aktifis di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia mulai mengumpulkan dana bantuan secara langsung bagi organisasi-organisasi masyarakat Aceh di tingkat basis. Berlawanan dengan lembaga-lembaga dan organisasi non pemerintah internasional yang datang ke Aceh setelah penghancuran, para kelompok lokal ini tahu masyarakat dan tanah mereka. Mereka dipercaya oleh

masyarakat Aceh dan dapat bekerja tanpa menyuap atau mendapatkan persetujuan dari pejabat Indonesia.

Kelompok-kelompok ini telah hidup bertahun-tahun di tengah peperangan dan pemindahan paksa, berpengalaman dengan para pengungsi dan situasi darurat. Mereka akan berada di Aceh dalam waktu lama setelah Aceh menghilang dari berita-berita utama. Masa darurat di Aceh telah berkurang, dengan kebanyakan mengubur yang

meninggal dan memberikan pemukiman sementara serta menyediakan makanan bagi mereka yang selamat. Tugas-tugas yang paling berat dari membangun kembali kehidupan, komunitas, gedung-gedung, infrastruktur dan masyarakat hanyalah permulaan. Pekerjaan ini akan memerlukan waktu bertahun-tahun, dan harus dikelola oleh masyarakat dan organisasi-organisasi Aceh, dengan bantuan keuangan dan lain-lain dari luar negeri.

Lebih dari lima tahun, masyarakat di Timor-Leste belajar banyak tentang pembangunan dari penghancuran yang luas: apa yang berjalan dan apa yang tidak, kepada siapa kita mengandalkan diri dan siapa yang mempunyai rencana mereka sendiri. Banyak lembaga-lembaga dan organisasi non pemerintah internasional yang dulu bekerja di Timor-Leste, sekarang di Aceh. Kita melihat ke depan untuk menumbuhkan kerja sama antara masyarakat Timor-Leste dan Aceh, seperti kita berbagi pengalaman kita untuk membantu ketika mereka perlu.

Solidaritas masyarakat basis akan memampukan rasa percaya, pembangunan yang berpusat pada perdamaian dan manusia, memulihkan martabat dan kemandirian kepada mereka yang selamat dari tsunami. ❖



Pada satu hari di akhir Desember, gempa bumi dan tsunami membunuh orang-orang di Aceh sama banyaknya dengan jumlah orang yang dibunuh Indonesia selama perang seperempat abad di Timor-Leste. Kekuatan alam menghancurkan lebih banyak gedung dan infrastruktur daripada yang dihancurkan oleh milisi yang didikte oleh TNI di Timor-Leste pada September 1999. Penghancuran kehidupan, perumahan, komunitas masyarakat dan mata pencaharian di Aceh tidak bisa dibayangkan, bahkan oleh mereka yang mengalami September kelabu di Timor-Leste.

Sebelum tsunami, masyarakat Aceh telah menderita tekanan yang brutal dari militer dan polisi Indonesia. Setelah gencatan senjata yang tidak lama, negosiasi-negosiasi gagal di awal 2003, dan Indonesia menangkap para juru runding dan mendepak para wartawan internasional dari Aceh. Hukum Darurat Militer dan masa darurat sipil di Aceh membunuh ribuan dan memindahkan puluhan ribu penduduk, kebanyakan masyarakat sipil yang tidak mempunyai hubungan dengan gerakan kemerdekaan GAM. (Lihat Editorial, Buletin *La' o Hamutuk* Vol. 4, No. 3-4: Agustus 2003.) Setelah tsunami, GAM menanggukkan operasi-operasi militer, tetapi TNI melanjutkan untuk bertempur, membunuh lebih dari 120 orang.

Seperti di Timor-Leste setelah September 1999, lembaga-lembaga internasional datang dengan cepat ke Aceh, membawa makanan, pemukiman dan perawatan kesehatan darurat, menyelamatkan banyak orang yang masih hidup. Aceh sekarang mulai membangun kembali, sebuah proses yang diketahui oleh masyarakat Timor-Leste akan memakan waktu yang sangat panjang. Kita juga mengetahui tentang program-program yang seringkali salah arah oleh lembaga-lembaga multilateral dan bantuan internasional, dan kesulitan-kesulitan mereka dalam mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat lokal.



AP doc.

Ada satu perbedaan penting antara Timor-Leste dan Aceh-kehadiran militer Indonesia yang terus berlanjut. TNI meninggalkan Timor-Leste setelah menghancurkannya, mengizinkan kita untuk membangun kembali sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Di Aceh, kehadiran militer masih terus bertambah, dan Pemerintah Indonesia menekan setiap ekspresi masyarakat umum untuk menentukan nasib sendiri.

Tsunami membawa Aceh ke perhatian dunia, memaksa Indonesia untuk mengizinkan para pekerja bantuan, para wartawan, dan tentara internasional memasuki wilayah Aceh. Masyarakat di seluruh dunia sekarang mengetahui persoalan-persoalan militer dan politik di sana. Ini akan menyulitkan Indonesia untuk mengisolasi Aceh lagi (meskipun tidak diragukan mereka akan mencoba lagi), dan kepentingan internasional dapat membantu penyelesaian konflik yang dinegosiasikan.

(Bersambung ke halaman 18)

Apa itu La' o Hamutuk?

La' o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi di Timor Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Leste dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La' o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La' o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Leste yang efektif. Selain itu, *La' o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Leste. Staf *La' o Hamutuk* baik itu staf Timor Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab dan memperoleh gaji yang sama. Terakhir, *La' o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menye-diakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La' o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La' o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La' o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Leste serta masyarakat internasional. ❖